

BAB II

DINAMIKA KONFLIK DALAM KEBUNTUAN HUBUNGAN TIONGKOK DAN INDIA

Bab ini menjelaskan mengenai sengketa antara Tiongkok dan India yang berlangsung sejak 1962-2020. Pengaruh yang semakin meningkat dari Tiongkok maupun India kian mempengaruhi ketegangan di wilayah sengketa. Beberapa konflik terjadi dalam waktu tertentu mengindikasikan krusialnya wilayah yang menjadi target kedua pihak. Sebagaimana Tiongkok yang melakukan klaim atas wilayah tersebut sebagai aspek penting untuk mencapai kepentingannya. Peningkatan intensi ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika hubungan antara Tiongkok dan India.

2.1 Dinamika Relasi Tiongkok- India

Tiongkok- India menjalin relasi yang luas di berbagai sektor yakni ekonomi, agama serta budaya. Selama ratusan tahun, kedua negara memiliki hubungan erat tanpa intervensi, yakni pada abad kedua sebelum masehi. Perkembangan meningkat signifikan sejak berpindahnya kaum budha dari India ke Tiongkok melalui jalur sutra. Secara historis, kedua negara merupakan korban dari kolonialisme dan penjajahan sehingga memiliki persamaan latar belakang yang menciptakan dinamika baik dari sisi geopolitik, sosial dan budaya (Dasgupta, 2016: 7). Dalam sejarahnya, Tiongkok-India memiliki jalinan diplomatik yang baik pada sikap saling mendukung satu sama lain. Salah satunya ialah India mendukung kebebasan Tiongkok pada perang tahun 1937 bahkan mengirimkan misi medis untuk korban

perang. India bahkan mengakui pendirian Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1950 (Dasgupta, 2016: 11). Seiring meningkatnya eskalasi konflik pada tiga sektor perbatasan, yakni sector barat, sector tengah dan sector timur yang membuat hubungan kedua negara memburuk. Pecahnya serangan Tiongkok terhadap India merefleksikan kegigihan Tiongkok mempertahankan kepentingan nasionalnya. salah satunya LAC di Aksai Chin yang memiliki 219 rute yang menghubungkan Tibet dan Xinjiang untuk memantau wilayah Asia Tengah yang strategis.

Perebutan Tibet sebagai Pemicu Eskalasi

Eksistensi Tibet menjadi faktor penting yang menjadi alasan timbulnya konflik LAC antara Tiongkok dan India. Selama enam dekade, letak Tibet membuat negara ini bernilai lebih dalam pandangan kedua negara seperti persamaan keadaan masyarakat, agama, budaya yang membuat Tibet terhimpit dalam kepentingan Tiongkok maupun India. Namun, Tiongkok menjadi negara yang menginvasi Tibet pertama kali pada 1950 hingga kedua wilayah pun melancarkan aksi saling mengklaim menjadi bagian teritorinya mengikuti kebijakan yang mereka atur (Sikri, 2011: 9). Hal ini tak terlepas dari persamaan kultur dan demografi memberi pengaruh atas klaim tersebut. Tibet berbatasan dengan wilayah sengketa seperti Karakoram, Kashmir serta Uighur di Xinjiang dengan ketinggian rata-rata 5000 mdpl seperti Pegunungan Himalaya. Pentingnya Tibet bagi kedua negara tidak terlepas pula dari tiga danau besar dari Tibet yang menjadi sumber mata air atas sungai yang mengalir di India dan Tiongkok



Gambar 2. 1 Peta Letak Tibet (Global Times, 2022)

Cengkraman Tiongkok atas Tibet tak bisa dilepaskan dari sisi demografi dan sosial antara keduanya. Menurut catatan sejarah, pernikahan Putri dari Nepal dan seorang putri dari Tiongkok pada 620 SM berdampak meluas seperti menyebarnya budaya Tionghoa yang mempengaruhi lapisan masyarakat di Tibet. Terlebih dengan ikatan kerjasama antara Dalai Lama ke-5 dengan Dinasti Manchu pada 1648 yang menciptakan hubungan ‘spesial’ kedua negara setelah Ajaran Buddha membawa kedekatan Tibet-India atas nilai Dharma yang mana kedua nya saling berbagi pengaruh (Sikri, 2011: 13-14). Interaksi ini memunculkan berbagai bentuk asimilasi budaya seperti sastra buddha yang berbahasa India terutama di Lhasa sebagai pusat pemerintahan. Secara tidak langsung, India banyak mempengaruhi peradaban Tibet yang membuat India mempertahankan Tibet sebagai bagian darinya.

Pada abad ke-20, dampak invasi Inggris ke Tibet dirasakan oleh Dinasti Manchu atas berbagai bentuk kekuatan kolonial berhasil yang mengguncang dan melecehkan eksistensi Tiongkok hingga terpuruk sebagai 'Abad Memalukan'. Setelah peristiwa ini, Tiongkok berupaya mengawasi Tibet karena dinilai penting atas letaknya yang strategis. Tibet berdekatan dengan Xinjiang provinsi yang besar bagian Tiongkok. Tibet juga diperkirakan memberikan hampir 40 persen cadangan mineral bagi Tiongkok dan sumber daya air bagi perairan utama di Tiongkok. Berlimpahnya sumber daya ini menjadi peluang Tiongkok karena Tibet dianggap belum mampu mengelola secara maksimal. Oleh karena itu, Tiongkok berencana untuk membawa Tibet sepenuhnya dalam kelompoknya (Sikri, 2011: 15-18).

Tiongkok juga menetapkan Tawang merupakan bagian dari Tibet yang disebut "Zhang Nan" karena menjadi pusat penyebaran Buddha di Tibet. Tawang, Arunachal Pradesh merupakan wilayah yang disengketakan karena terletak di selatan Tibet. Minoritas Etnis Cina pun telah bermukim lama di Tawang seperti Moina dan etnis Tibet. Monyul, Loyu dan Distrik Zayul ke perbatasan tradisional sebelah timur menjadi bagian dari sektor Tiongkok. Adapun penduduk Tawang Zong masih berada dalam yurisdiksi pemerintah Tibet. Penduduk ini merupakan orang berkewarganegaraan Tibet yang tak jarang masih mengalir hubungan darah dengan masyarakat Tibet. Tawang pun dianggap krusial sebagai strategi pengawasan dan kendali Tiongkok. Di sisi lain, India bersikeras menempatkan Tawang dalam wilayah bagiannya melalui pernyataan "tidak untuk didiskusikan" (Dasgupta, 2016: 26).

Sentimen dimulai setelah Tiongkok menilai bahwa India Tengah melanjutkan ‘*master plan*’ yang ditinggalkan oleh Inggris dalam mewujudkan “dinasti raksasa” terutama di Asia Selatan. Tak hanya itu, kebijakan India juga dipengaruhi oleh strategi Amerika-India pasca PD II untuk menguasai daerah prioritas Tiongkok, yakni Tibet (Ling, 2009: 7). Tiongkok memandang India memiliki rencana untuk mengontrol Tibet sebagai koloninya pada 1949. Dugaan semakin menguat dengan kedekatan pemuka politik Tibet, Dalai Lama yang semakin membuka peluang India untuk memiliki relasi khusus dengan Tibet. Kebijakan Dalai Lama yang pro-India banyak diluncurkan seperti mudahnya akses internasional menuju Tibet lewat India yang membuat posisi Tiongkok semakin terancam. Dibukanya akses internasional yang menguntungkan India dalam mendapatkan dukungan baik secara diplomasi maupun persenjataan dari pihak eksternal (Ling, 2009: 10).

Pada 1950, Tiongkok mulai menempatkan posisinya dengan membangun jaringan transportasi yang mutakhir di Tibet. Jalan dari Szechuan melalui Icham pun diselesaikan pada tahun 1954. Agenda dilakukan melalui pembangunan rute yang mudah ke Tibet melalui Xinjiang dengan melintasi dataran tinggi Aksai Chin yang terpencil dan tak berpenghuni. Pembangunan jalan ini melintasi Aksai Chin yang menghubungkan Xinjiang dengan Tibet berfungsi memudahkan pengawasan Tiongkok pada pergerakan India di lokasi yang sulit dijangkau. Xinjiang-Uygur Autonomous Region merupakan daerah subdivisi politik terbesar di Tiongkok yang terletak di pegunungan dan padang pasir (Ghosh, 2017: 16).

Intensi mulai memanas ketika PM Jawaharlal Nehru mengendus niat Tiongkok untuk menduduki Tibet. Secara Realistis, Nehru menilai bahwa Tiongkok mencoba untuk menyusup atau menduduki daerah yang disengketakan. Dengan demikian, Pemerintah India mulai mengambil langkah-langkah untuk menetapkan kontrol administratif atas wilayah Ladakh-Himalaya yang terpencil melalui Badan Perbatasan Timur Laut India, yaitu Arunachal Pradesh. India perlu mengamankan wilayah ini. Upaya yang dilakukan kian serius terbukti dari terjalinnya Kerjasama India dan Amerika Serikat untuk menekan invasi Tiongkok di Tibet melalui perjanjian bantuan keamanan pada 1951 (Ghosh, 2017: 17).

Strategi untuk mengamankan perbatasan kian digencarkan seperti upaya melegalkan garis demarkasi secara sah bagi salah satu pihak. Menurut Shisheng (2020), kebijakan ini dipengaruhi oleh pandangan India sebagai '*natural successor to the colonial legacies of British Empire*' yang dianggap oleh India sebagai negara yang layak dijadikan panutan sehingga ingin mempraktekkannya secara konsisten. Upaya ini diterapkan India dengan bersikap keras dan defensif bahkan menunjukkan penerbitan peta resmi yang diambil antara tahun 1953 dan 1954 yang menunjukkan batas antara India dan Tibet di seluruh sector. Nehru mengaitkan batas sektor barat yang ditentukan oleh kebiasaan dan tradisi. Di Sektor Timur ditentukan oleh Garis McMahon dari Laos ke Bhutan melalui Burma. Perjanjian ini disusun dalam Konvensi Simla tahun 1914.

Tiongkok menolak tegas keputusan sepihak ini melalui pengakuan bahwa Tibet tidak terpisahkan dari Tiongkok dilihat secara historis. Tiongkok pun menetapkan Tibet sebagai pusat dalam strategi perencanaan oleh pemerintahannya

yang tercatat dalam *White Paper* tentang Sembilan strategi pertahanan yang dikhususkan untuk isu Tibet. Salah satunya ialah strategi untuk melemahkan konektivitas Tibet dan India yang terhubung melalui ekonomi tradisional masyarakat Tibet. Hal ini guna mengurangi hak ekstrateritorial India di Tibet maupun legitimasinya. Strategi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Perdagangan dan Hubungan atau dikenal dengan *Panchsheel Agreement* antara India dan Tiongkok pada 1954 (Dasgupta, 2016: 20-25).

Strategi Tiongkok diluncurkan dalam usulan the *Five Principles of Peaceful* atau disebut dengan *Pancha Shila* terkait penegasan otorisasi Tiongkok atas Tibet sebagai bagian dari wilayah. *Pancha Shila* memuat beberapa point, yakni i) Sikap saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara; ii) Sikap non-agresi untuk kedua negara; iii) tidak saling mengganggu untuk urusan masing-masing negara; iv) adanya kesetaraan untuk saling menguntungkan kedua negara; v) koeksistensi damai. Setelah disusunnya *Panchsheel Agreement* yang sempat menyurutkan tensi dalam hubungan diplomatic. Namun, kondisi berlangsung sebaliknya pada tahun-tahun berikutnya (Dasgupta, 2016: 26).

Sikap saling curiga dan ketidakpercayaan yang meningkat antara Tiongkok dan India mengindikasikan eskalasi konflik semakin bertambah. Pemicu yang utama adalah dengan pembangunan jalan Aksai Chin yang menghubungkan Xinjiang dan Tibet yang dikenal dengan *G219 highway* berhasil dibangun oleh Tiongkok pada 1957. Tiongkok semakin menunjukkan sikap agresifnya dengan menempatkan pasukan di wilayah yang diklaim oleh India seperti di bagian timur wilayah Ladakh dari negara bagian India Jammu Kashmir (Dasgupta, 2016: 28).

India menilai bahwa Tiongkok bahkan menerbitkan peta yang mengklaim sebagian besar NEFA yang mencakup Arunachal Pradesh sebagai wilayahnya. Aksi ini sebagai Langkah Tiongkok untuk memperkuat cengkramannya di Tibet dan mengklaim wilayah tersebut. Agresivitas Tiongkok pun dipengaruhi oleh keterlibatan India dalam agenda Amerika Serikat dalam mendukung Tibet dan dukungan India pada Gerakan separatis Tibet pada 1959. Tiongkok menempatkan pasukan patrol di Kongka La yang menjadi bagian wilayah yang diakui oleh India. Hal inilah yang mendorong pada pecahnya perang antara Tiongkok-India di 1962 (Dasgupta, 2016: 31).

LAC salah satunya dengan Aksai Chin yang memiliki 219 rute menghubungkan Tibet dan Xinjiang untuk memantau wilayah Asia Tengah yang strategis. Sengketa ini pun telah menginjak ranah geopolitik yang lebih serius. Para pembuat kebijakan Tiongkok yang kerap kali memperhitungkan kepentingan krusial Tiongkok, seperti dinamika Tiongkok-India, Geopolitik Asia Tenggara dan Tiongkok-Amerika Serikat kompetisi strategi dalam prisma kebangkitan Tiongkok (Nagial, 2022). Dengan pemerintah India mempersepsikan dirinya sebagai hegemon di Asia Selatan sehingga LAC dinilai sebagai “wilayah yang tidak terbuka untuk didiskusikan”. Namun, hakikatnya persaingan ini mengarah pada pesaing utama Tiongkok, yakni Amerika Serikat yang telah membawa implikasi geostrategi yang mengancam (Rafi, 2020).

2.2 Konflik *Line of Actual Control*



Gambar 2. 2 Peta *Line of Actual Control* (South China Morning Post, 2022)

Setelah kedaulatan perbatasan menjadi istilah yang dikembangkan oleh negara modern sebagai konsolidasi politik atas teritori mereka. Kedua negara, Tiongkok dan India yang mengalami dilema keamanan yang intensif. Strategi yang ditetapkan Tiongkok di Tibet tak terlepas dari dorongan atas ketegangan hubungannya dengan India. Gesekan yang terjadi akibat perselisihan dengan kebuntuan yang berkepanjangan di sepanjang LAC. LAC dikembangkan berdasarkan batas antara Tiongkok dan India sepanjang 3.488 km dari Karakoram di Barat, pegunungan Myanmar di Timur dan Himalaya (Rosenfield, 2010: 4).

Penarikan garis tersebut atas agenda invasi Inggris di India. Inggris menganeksasi Kashmir yang memainkan peran penting dalam strategi pengamanan Inggris di perbatasan utara India. Pada tahun 1865, W. H. Johnson memasukkan Aksai Chin menjadi bagian Kashmir. Sementara Aksai Chin adalah dataran tandus yang tidak berpenghuni. Kondisi ini dianggap sempurna sebagai tempat yang strategis dengan titik lintas vital antara Tibet dan Xinjiang (Rosenfield, 2010: 6).

Berdasarkan Konvensi Simla 1914 Sir Henry McMahon, kolonial Inggris di India melandasi perhitungan atas wilayah ini membatasi British di India dan Tiongkok. Penetapan kemudian dipetakan sebagai wilayah perbatasan disebut McMahon Line atau Garis McMahon (Dasgupta, 2016: 8). Atas dasar pemetaan tersebut dianggap memiliki legitimasi oleh India. Tiongkok menolak keputusan perihal kesepakatan bilateral tersebut karena tidak meratifikasi Konvensi Simla yang dianggap mencederai kedaulatannya.

Inggris menargetkan Tibet sebagai wilayah dengan potensi diseludupi oleh tentara Rusia. Dampak yang diciptakan cukup mempengaruhi strategi Tiongkok untuk Tibet yang memiliki akses strategis bagi Tiongkok. Kemudian, Pemerintah Tiongkok bernegosiasi dengan Inggris dengan harapan menghapus kedaulatan Tibet selaku negara yang independen melalui perubahan konvensi Inggris-Tibet menjadi Inggris- Tiongkok. Pengajuan ini disetujui oleh Inggris dan menekankan hubungan Tiongkok-Tibet dalam konsep "*Suzerainty*". Konsep ini didefinisikan sebagai negara memiliki kedaulatan atas negara lain yang memiliki

pemerintahannya sendiri namun tidak dapat bertindak sebagai kekuatan independent (Rosenfield, 2010: 9).

Terminologi LAC muncul dalam penyebutan area yang dipisahkan oleh pegunungan yang memisahkan kendali teritorial China dan wilayah kontrol India tersebut. Istilah ini diasosiasikan oleh Perdana Menteri China, Zhou Enlai saat berkirim surat dengan Jawaharlal Nehru pada 1959 (Dasgupta, 2016: 9). LAC memuat pertimbangan Tiongkok atas garis antara kedua negara yang berdasarkan catatan sejarah, kontrol administrative dan keterkaitan budaya di wilayah tersebut.

Atas penolakan India, Tiongkok berupaya untuk melegalkan melalui kunjungan Zhou ke India pada tahun 1960 dan 1962. India menolak secara konsisten atas status hukum LAC yang dinilai sepihak. Secara garis besar gesekan yang tengah berlangsung selama puluhan tahun berfokus pada dua area utama yakni sepanjang perbatasan Himalaya dengan Aksai Chin. Namun, secara menyeluruh sengketa teritorial ini dipisahkan pada tiga bagian, yakni Sektor Timur, Sektor Tengah dan Sektor Barat.

2.2.1 Sektor Barat

Aksi klaim wilayah antara Tiongkok dan India telah berlangsung hingga puluhan tahun termasuk tiga titik wilayah sengketa pada sektor ini yakni Koridor Wakhan (Afghanistan), Jammu (India) dan Xinjiang (Tiongkok). Histori mencatat bahwa sector ini dimulai pada gesekan setelah Jenderal Zorawar Singh mengklaim wilayah Ladakh menjadi bagian dari Jammu. Datangnya kolonial Inggris yang berusaha merebut kekuasaan kerajaan Singh memperkeruh suasana. Situasi ini

berakhir pada kemenangan Inggris pada 1846 yang membuat pemetaan wilayah berada ditangan Inggris. Potensi wilayah yakni Karakoram Pass di utara dan Danau Pangong di selatan namun kedua wilayah telah di demarkasi oleh India (Abitbol, 2009: 8). Di sektor ini dapat dikatakan sebagai panggung utama strategi jangka panjang Tiongkok di Tibet barat.

Target utama merujuk pada daratan pada ketinggian 22,000 kaki yang tidak berpenghuni, Aksai Chin dengan luas sekitar 38,000 km². Aksai Chin merupakan wilayah yang melingkupi Daerah Otonomi Xinjiang Uyghur dibawah control Tiongkok. Inggris melakukan upaya pemetaan untuk mengklaim Aksai Chin sebagai bagian dari Jammu dan Kashmir dibawah India yang dikenal dengan 'Johnson Line' pada 1865. Upaya ini direspon oleh Tiongkok dengan penolakan melalui pembatasan pada Karakoram Pass yang ternyata meninggalkan 1570 km² tanpa patroli. Kesempatan ini ditemukan saat Inggris melakukan survey pada 1897 yang merujuk pada pemetaan ulang untuk menandai wilayah tanpa patrol tersebut lewat penamaan Mccartney-Macdonald Line. Proposal pengajuan telah dikirimkan oleh Inggris kepada Tiongkok pada 1899. Namun, Tiongkok tidak merespon keputusan pemetaan tersebut (Rosenfield, 2010: 12).

Daerah yang disengketakan dibagi menjadi dua porsi dengan Konka Pass sebagai titik pemisah. Bagian utara Konka Pass berbatasan dengan Xinjiang dan Ladakh yang membentang sepanjang pegunungan Karakoram. Johnson Line tetap diakui oleh India setelah kemerdekaan menciptakan ketegangan yang intense diantara keduanya.

Agenda klaim seluruh wilayah Aksai Chin oleh Tiongkok pun mengarah pada aksi serius lewat pembangunan Tol Barat yang menghubungkan Xinjiang dan Tibet yang melintasi Aksai Chin, Tibet pada 1957. Pembangunan infrastruktur tersebut memiliki konotasi militer dan penekannya ada di perbatasan. Tiongkok telah membangun pangkalan udara pada sektor ini yakni Kahgar dan Hot Anand Garr. Beberapa tersambung di wilayah Qijil Gilga dan Garr untuk memastikan pengelolaan perbatasan dalam keadaan menguntungkan operasional dan damai (Rosenfeld, 2010: 16).

Baik Tiongkok maupun India mampu menerjal hamparan luas pegunungan dengan membangun armada militer yang melintasi LAC. Sebagaimana Dataran Depsang menjadi landasan terbang tertinggi di dunia berada di ketinggian kurang dari 16.000 kaki. Landasan terbang tersebut terbentang dengan total 14 lintasan yang saling mengapit dan bersilangan untuk pemantauan. Diperburuk dengan tingkat akumulasi salju yang tinggi menciptakan kondisi dingin yang ekstrim. Pemantauan ini berkaitan dengan sikap kedua pihak yang saling mengklaim. Aksi klaim India atas wilayah Tiongkok tentunya membuat geram dengan dasar wilayah pendudukan harus dipegang dan dipertahankan oleh mereka sebagai integritas territorial.

2.2.2 Sektor Tengah

Saling terhubungnya antara jalur satu dan lainnya membuat area sengketa membentang pada sektor tengah yang ditarik sepanjang 545 km² di sepanjang Himachal dan Uttar Pradesh. Tiongkok mengukur klaim wilayahnya sekitar 2000 km² dengan delapan gumpalan kecil yang terpisah. Secara komparatif berdasarkan

tiga sektor, sektor tengah dikatakan lebih stabil namun bagiannya masih diperdebatkan. Secara garis besar. Bagian yang disengketakan hanya berupa sepetak kecil lahan penggembalaan di daerah Hasil dan Rohim. Garis batas melintasi Sungai Zahgana di sebelah barat Tsungsha ke arah Mana Pass ke sebelah timur (María & Vidal, 2021: 17).

Fitur medan utama bentangan ini tidak meninggalkan ruang untuk garis tepi sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sempit menimbulkan pertentangan. Sektor ini membentang hingga titik persimpangan perbatasan Uttarakhand-Nepal di timur. Keterbatasan akses menciptakan renggangnya komunikasi di pihak India dengan negara bagian yang terlibat. Jarak dari dataran Gangga ke garis Daerah Aliran Sungai (DAS) berkisar 300 hingga 400 Km. Dengan struktur jalan berupa bukit berhutan yang terbentang dan pegunungan terjal dengan puncak yang diselimuti salju membuat sulitnya akses untuk menjangkau wilayah ini (María & Vidal, 2021: 18). Dengan kelemahan akses India dalam menjangkau wilayah ini menjadi keuntungan bagi Tiongkok dalam hal komunikasi via darat di sektor ini. Meskipun faktor geografis yang sering mengalami gangguan akibat banjir maupun tanah longsor. Pengawasan India pun beralih pada jalur udara dengan serangkaian pangkalan udara di Bareilly, Lucknow, Gorakhpur dan Allahabad.

2.2.3 Sektor Timur

Gesekan yang terjadi akibat sengketa perbatasan menyentuh sector timur yang melibatkan wilayah Sikkim dan Arunachal Pradesh di dalamnya. Hal ini merupakan akibat dari kemenangan inggris dalam perang Anglo-Burma (1824-

1826) membawa agenda aneksasi Assam. Inggris menetapkan Burma sebagai batas kontrol pemerintah Inggris di India dan Tiongkok. Belum terjemahnya wilayah ini membuat Inggris memberlakukan sistem “*Inner Line Permit*” pada 1873. *Inner Line Permit* atau Izin Garis Dalam merupakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Pemerintah India yang diberlakukan baik untuk warga India maupun Warga Asing untuk memasuki Kawasan yang dilindungi. Pada saat yang sama, bagian lain masuk dalam wilayah pengakuan India dalam ‘*Outer Line*’. Garis ini ditarik dari perbatasan Bhutan ke Sungai Baroi di sebelah tidak ada batasnya. Garis ini tidak dipublikasikan oleh India dan hanya ditentukan secara Lisan oleh pemerintah Indi. Upaya Inggris ini kemudian diadopsi menjadi kebijakan sah dengan subdivisi politik Badan Perbatasan Timur Laut (NEFA) (María & Vidal, 2021: 20).

Wilayah yang terbentang sejauh 900 km mulai dari Bhutan di barat dan melewati ‘Lekukan Besar’ sungai Brahmaputra di Timur tentu menjadi wilayah penting bagi Tiongkok maupun India atau Inggris. Inggris secara gencar menargetkan tujuannya untuk mengklaim wilayah tersebut melalui Ekspedisi Abor di bawah komando Mayor Jenderal Hamilton Bower. Aksi ilegal ini tetap disampaikan oleh Sir Henry McMahon, perwakilan pemerintah Inggris di India mengusulkan batas tersebut berdasarkan prinsip dari “Daerah Aliran Sungai” yang dikenal sebagai Garis McMahon. Perbedaan pendapat kemudian diselesaikan oleh India, Tiongkok, India menarik garis berdasarkan fenomena geografi yakni DAS yang dianggap sebagai perbatasan alami. Alastair Lamb dalam bukunya *British and Chinese Central Asia: The Road to Lhasa 1767-1905* menyebutkan “Perbatasan tradisional yang tepat berdasarkan Daerah Aliran Sungai telah diadopsi oleh

Pemerintah Inggris melalui formulasi yang tepat sebagai perbatasan bukan hanya bersifat historis” (María & Vidal, 2021: 23-25).

Pernyataan India terhadap aksi klaimnya segera dibantah oleh Tiongkok berdasarkan map versi 1938 “*Tibet and Adjacent Countries*” bagian sektor timur perbatasan yang membentang ke arah timur dari sudut tenggara Bhutan ditandai sebagai perbatasan internasional. Lokasi segmen ini justru berada di peta Tiongkok sedangkan peta India tidak menunjukkan Garis McMahon yang menjadi dasar acuan mereka. Selain itu, pernyataan Indian bahwa Garis McMahon merupakan ‘perwujudan yang sesuai dengan hukum tradisional, etnis dan administrative perbatasan secara sah’ sehingga menuntut untuk menyesuaikan dengan fenomena geografi berupa DAS. Tentu saja Pemerintah Tiongkok menilai keputusan tersebut tidak logis karena DAS bukanlah faktor krusial sebagai landasan natural demarkasi perbatasan. Dengan begitu, bagi Tiongkok garis McMahon bukanlah garis perbatasan alamiah melainkan produk buatan kolonialisme (María & Vidal, 2021: 28).

Setelah kegagalan negosiasi, adanya sikap agresif dari kedua pihak baik Tiongkok maupun India. India mengajukan klaim berdasarkan Garis McMahon yang dianggap sah secara de facto dan de jure. Sikap tersebut dilakukan melalui negara bagiannya Asam untuk menguasai Tawang, yang semula dikenal dengan NEFA berganti dengan Arunachal Pradesh. Pada 1944 dan 1945 pasukan Inggris mengirim pasukan untuk menginvasi area *Monyul, Karko, Simong* dan Distrik *Luoyu*. India mendirikan pos Assam Rifles (AR). Kehadiran Dalai Lama di India

semakin memperumit perselisihan. Tiongkok mengambil Langkah tegas dengan pengerahan tentara di sepanjang perbatasan kemudian menyerang pos AR di Longju. Garis pertempuran semakin menuju eskalasi (Rosenfield, 2010: 25).

Perbatasan Sikkim-Tibet, terletak di sebelah barat sebagai perbatasan Arunachal Pradesh-Tibet di sepanjang Garis McMahon yang disengketakan di sebelah timur. Sikkim-Tibet adalah bentangan kecil sepanjang 350 km. Titik tersebut ditarik dari Nepal ke arah timur berbelok ke selatan dan berakhir di perbatasan Bhutan. Di area ini Tiongkok memiliki keuntungan dengan jaringan jalan yang bagus hingga ke kota perbatasan Yadong dan jalan yang berakhir di Nathula daripada akses India. Penyelerasan perbatasan menciptakan lembah Chumi yang sempit. Namun, segmen ini bernilai strategis karena kedekatannya dengan “Koridor Siliguri” yang menghubungkan negara bagian timur laut ke seluruh India (Ghosh, 2017: 29).

Adanya wilayah sebagai area sensitif militer seperti Karen Plateau di utara, Lachung ridgeline di timur laut dan kelompok tiga celah seperti Cho La, Nathula dan Jelep La. Dimulai dari perbatasan Bhutan di barat yang kemudian membentang ke timur sepanjang Garis McMahon (Ghosh, 2017: 31). Kemudian ke arah selatan berakhir di titik persimpangan perbatasan India-Myanmar-Tiongkok. Dekat dengan perbatasan adanya dataran tinggi Tibet dengan pegunungannya. Akses yang tersedia guna kepentingan pengawasan terhubung dengan jalan lepas landas dari Jalan Raya Timur. Segmen ini juga dekat dengan LAC yang menghubungkan ujung barat dan timur dengan perkembangan pembangunan.

Negara bagian India terhubung sekitar 350 km dari kaki bukit Assam hingga garis McMahon yang tertutup salju. Wilayah ini merupakan Arunachal Pradesh yang menjadi titik perdebatan. Negara bagian dibagi berdasarkan lima lembah yang terpisah oleh sungai yang mengalir ke sungai Brahmaputra. Lembah-lembah ini menjadi akses mobilitas seperti Kameng, Subansiri, Siang, Dibang and Lohit. Lembah ini memiliki jalan yang cukup ekstrim untuk mencapai Tawang. Namun, dibangunnya infrastruktur oleh Tiongkok maka Tawang memiliki akses menuju LAC. Lohit di timur juga terhubung melalui jalan darat dan juga memiliki jalur pendaratan dekat dengan perbatasan di Walong (María & Vidal, 2021: 33). Namun, tiga lembah di antaranya jauh lebih terpencil. Tiongkok memiliki fasilitas yang memadai dengan membangun infrastruktur di dekat dan di sepanjang perbatasan yang disengketakan termasuk dalam pembangunan militer.

2.2.4 1962 War: Pecahnya Perang Antara Tiongkok dan India

Perang merupakan situasi dimana adanya konflik yang beruntun, kesalahpahaman yang buntu karena kemunculan pemicu dibalik masalah yang serius. Perang menjadi alat dan upaya negara dalam mewujudkan kepentingannya. Kompleksitas masalah perbatasan menjadi simpang siur menimbulkan kekacauan baru lainnya. Sebagaimana invasi Tiongkok di Tibet yang menimbulkan pemberontakan besar-besaran pada tahun 1959 di wilayah Khan dan Amdo. Hal ini menimbulkan ketegangan di provinsi Qinghai, Gansu dan Yunnan. 31 Maret 1959, pemimpin Tibet Dalai Lama melintasi perbatasan ke India untuk menerima suaka politik. Dalai lama yang berpindah menimbulkan kerusuhan dan ketegangan di perbatasan India-Tiongkok. Kegentingan ini direfleksikan dengan kegagalan

Nehru-Zhou dalam pertemuan diplomatic pada April 1960. Kemudian, melalui koordinasi dari pemerintah Tiongkok untuk menguatkan kehadiran militer Tiongkok di Ladakh (Ii & Hubungan, 2017: 7).

Keengganan Tiongkok untuk melepaskan Aksai Chin membuatnya menawarkan pilihan kepada India terkait penukaran Aksai Chin dengan wilayah sektor barat lainnya. Penawaran tersebut ditolak oleh Nehru. Nehru mengajukan prasyarat agar dilakukan penarikan PLA dari wilayah Aksai Chin. Diduga hal ini berasal dari desakan partai internal India dan secara umum merefleksikan keengganan India terlibat secara diplomasi dengan Tiongkok. Cengkraman India pada wilayah sengketa dianggap sebagai agresi oleh Tiongkok yang menjadi salah satu pemicu perang 1962 (Ii & Hubungan, 2017: 9).

Pada 1959, Kementerian Pertahanan NEFA yang menamai wilayahnya Arunachal Pradesh mengirimkan pasukan militer India untuk menjaga area ini. Kawasan timur berada dalam pengawasan Komandan Angkatan Darat Throat. Proposal Angkatan Darat ialah untuk mengambil alih pertahanan sector. Penyebaran divisi diperpanjang dari Darjeeling di barat ke persimpangan tri antara India, Myanmar dan Tibet di timur dengan bentangan lebih dari 1000 km. Brigade Infanteri ditugaskan untuk mempertahankan Sikkim. Nehru memerintahkan Angkatan Darat India untuk berjaga dengan aksi dari Angkatan Darat Komando Barat dan Timur untuk berpatroli sejauh mungkin ke garis yang dikenali sebagai wilayah sengketa perbatasan. Pada akhir Juni 1961, Komando Barat kemudian

menyerahkan sejumlah pos maju dari garis klaim Tiongkok. Pospos ini dikerahkan untuk menahan serangan Tiongkok yang terkoordinasi (Abitbol, 2009: 11).

Pada 1960, Tiongkok mengalami dua kondisi yaitu pecahnya Sino-Soviet yang menghilangkan sebagian kekuatan militer dan dukungan untuk Tiongkok. Yang kedua yaitu isu perbatasan telah mencapai puncak ketegangan yang mana diadakan pertemuan tingkat tertinggi untuk menyampaikan argumen kepemilikan tentang perbatasan yang akan diperiksa secara seksama yang dimediasi oleh pejabat sebagai solusi untuk menyelesaikan klaim. Kemudian pada 1961, melalui publikasi laporan pejabat pada bulan maret 1961 secara substansial membenarkan klaim India. Hal ini memicu kemarahan Tiongkok yang merasa kehilangan muka. Kerentanan geostrategis Tiongkok-India sehingga meningkatkan intervensi melintasi perbatasan (Abitbol, 2009).

Tiongkok membatasi serangan lewat pos yang dibangun sebagai rantai dan titik kuat untuk menghadapi pos-pos India dengan menyediakan Firepower oleh Artileri dan logistic yang memadai. Pasukan Tiongkok dikerahkan lebih dekat ke garis McMahon. Pada akhir Februari 1962, sebuah catatan diterima dari pemerintah Tiongkok terhadap tentara India, kemudian pemerintah Tiongkok akan merespons. Tiongkok merespon dengan mengirimkan catatan lain pada 30 April 1962 yang menyatakan bahwa mereka akan memutuskan untuk menjaga perbatasan mereka jika India terus menyerang wilayah Tiongkok. Tiongkok menyebar pasukannya pada sektor yang disengketakan. Dua patrol dilakukan dengan mengirim pasukan ke ujung barat Lembah Galwan. Namun, penjagaan tersebut terhambat oleh kontur

daratan yang cukup ekstrim sehingga gagal untuk melewatinya. Juli 1962, upaya dilakukan di pleton lain dengan 4/8 Senapan Gurkha dan kali ini berhasil. Sebuah pos kemudian didirikan di hulu Galwan (Abitbol, 2009: 15).

Adanya sikap saling menyerang satu sama lain memuat kedua pihak saling mengerahkan pasukan di garis perbatasan. Pada awal Juni 1962, Assam Rifles mendirikan sebuah pos Dhola yang dibangun di dekat Che Dong di lereng utara fitur Standar menghadap ke Sungai Namkachu. Pada September 1962, sekitar 60 tentara Tiongkok menuruni lereng Thella dan mengepung pos dengan menghancurkan kayu di atas Namkachu dan memantapkan diri di lereng depan Thagla Ridge. Kemudian, Oktober 1962, Gurkha yang memiliki keunggulan dalam penempatan penyerbuan pos di wilayah sengketa. Tiongkok menyerbu pos melalui jalur darat dari infrastruktur yang telah mereka bangun. Tiongkok unggul untuk jalur darat sebaliknya India terhambat dalam penyerangan jalur darat. India unggul di jalur Udara yang terhambat oleh kondisi cuaca (Li & Hubungan, 2017: 10).

Dalam praktiknya pemerintah Tiongkok mengikuti nilai perang dari ahli strategi Sun Tzu, yang menyatakan dalam bukunya “Prajurit yang hebat selalu menjadi pemenang kemudian pergi berperang, sementara prajurit yang kalah pergi berperang untuk mencari kemenangan”. Dalam perang 1962, prajurit Tiongkok memiliki persiapan yang baik untuk siap meluncurkan operasi. Karena itu, Tiongkok mengerahkan pasukan secara massif hingga terukur rasio 3:1 dari pasukan India. Ketimpangan pasukan justru membuat Tiongkok menikmati peperangan. Terlebih infrastruktur yang baik menciptakan jaringan yang sangat baik. Resimen juga dikerahkan untuk Area Qizil Jiga, Dam Guru, Noh, Tashigang

dan Gartok. Tiongkok juga mengerahkan satu batalyon di seberang Daulat Beg Oldi, Tiga Batalyon melawan Galwan, Konka dan Sirijap. Selanjutnya, Batalyon Infanteri juga dikerahkan di sektor selatan melawan pasukan India di Dimchelle dan Demchok (Ii & Hubungan, 2017: 12)..

India diuntungkan dengan Angkatan Udara yang baik. Namun pemerintah India tidak mengizinkan untuk menghindari ketimpangan kemampuan menandingi Angkatan Udara Tiongkok. Perang berlangsung hanya satu bulan tetapi menewaskan 1.383 tentara India dan 722 tentara Tiongkok. Banyaknya korban jiwa dipengaruhi oleh kontur medan perang yang ekstrim di ketinggian 14.000 kaki. Setelah memakan ribuan korban jiwa, Kedua pihak mengumumkan untuk gencatan senjata secara resmi pada 19 November 1962. Hal ini melihat bahwa adanya pihak asing yang turut ikut campur seperti Amerika maupun persoalan internal dari kedua pihak. Tiongkok mengumumkan untuk mundur dari posisi mereka ke utara garis McMahon yang dianggap ilegal. Namun, kabar ini belum terdengar hingga pasukan yang terisolasi di pegunungan dan terlibat dalam baku tembak. Pada akhirnya Tiongkok mempertahankan kendali actual atas wilayah Aksai Chin yang terletak di sektor barat, Sedangkan India dianggap menyerang dengan kurangnya persiapan (Ii & Hubungan, 2017: 16)..

Namun, Tiongkok menegaskan bahwa mereka bersiap untuk menyelesaikan batas-batas ada garis kontrol yang sebenarnya, yaitu menyelesaikan batas-batas pada LAC. Hal ini untuk mengkonfirmasi keselarasan McMahon di timur laut India dan Aksai Chin yang menjadi bagian Tiongkok. Penyerangan ini menjadi

penolakan akan ekspansi India di jalur McMahon yang dianggap ilegal oleh Tiongkok. Namun, pemerintah India masih belum dapat menerima dan menyebabkan kebuntuan yang tidak berkesudahan.

Adapun linimasa peristiwa yang terjadi berdasarkan tahun, sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Linimasa *Line of Actual Control*

No	Tahun	Peristiwa	Leader	Upaya Negosiasi
1	2	3	4	5
1	1959	Pemberontakan Tibet pada kepemimpinan Dalai Lama ke-14 yang melarikan diri ke India menyebabkan situasi diplomatic memburuk	PM India: Jawaharlal Nehru	Belum dinegosiasikan
2	1962	Pecahnya perang sengketa perbatasan Himalaya yang menewaskan 2000 pasukan Tiongkok dan 8000 pasukan India. Peristiwa ini membentuk hubungan India-Tiongkok hingga saat ini.	Pemimpin Partai Komunis Tiongkok: Mao Zedong	
3	1967	Pertempuran di Nathula dan Cho La (Sektor Tengah) yang didasari serangan berulang Tiongkok menewaskan 80 tentara India dan 400 tentara Tiongkok		
4	1975	Insiden Tulung La (Sektor Timur) atas dugaan tentara Tiongkok yang melewati perbatasan dan melakukan penyergapan pada patrol India menyebabkan 4 kematian tentara India		

1	2	3	4	5
5	1987	Insiden Lembah Sum Dorong Chu (Sektor Timur) Klaim Tiongkok atas Arunachal Pradesh sebagai “Tibet Selatan”, namun India memberikan status kenegaraan pada Arunachal Pradesh yang membuat kemarahan Tiongkok. Kunjungan Perdana Menteri India Rajiv Gandhi ke Beijing sebagai upaya diplomasi dalam Joint Working Group	PM India: Indira Gandhi Pemimpin Partai Komunis Tiongkok: Hu Yaobang	8 putaran negosiasi
6	2005	Kunjungan Wen Jiabao PM Tiongkok ke Bangalore untuk menandatangani perjanjian Kerjasama industri teknologi sebagai upaya penyelesaian sengketa Himalaya	PM India: Manmohan Singh Pemimpin Partai	22 putaran negosiasi
7	2009	Penolakan oleh Tiongkok atas klaim India pada kunjungan PM Manmohan Singh ke wilayah sengketa, Arunachal Pradesh	Komunis Tiongkok: Hu Jintao	
8	2010	Penolakan India atas kunjungan pejabat Tiongkok setelah Kerjasama Tiongkok-Pakistan atas Jammu dan Kashmir	PM India: Manmohan Singh	
9	2013	Insiden kebuntuan di Daulat Beg dan Chumar (Sektor barat) akibat saling mengusap kedua pihak dengan membangun tenda militer yang diredakan melalui pertemuan diplomatic <i>Border Defence Cooperation Agreement</i> (BDCA)	Pemimpin Partai Komunis Tiongkok: Hu Jintao	
10	2014	Kebuntuan Demchok (Sektor barat) penolakan India atas pembangunan Tiongkok di Demchok, wilayah yang diklaim oleh kedua negara pada pertemuan Xi Jinping dan PM Modi		

1	2	3	4	5
11	2015	Insiden baku tembak antara Tiongkok - India setelah pembongkaran Menara pengawas yang sedang dibangun Tiongkok di Ladakh Utara sebagai Kawasan sengketa	PM India: Narendra Modi Pemimpin Partai	20 putaran negosiasi
12	2017	Tiongkok membangun infrastruktur di jalur Doka La yang dianggap mengancam keamanan India. Sehingga Bhutan meminta Tiongkok memulihkan <i>status quo</i>	Komunis Tiongkok: Xi Jinping	
13	2020	Tawuran di Lembah Sungai Galwan yang menewaskan 20 tentara India dan 4 tentara Tiongkok		

(Jash, 2022)

2.3 Adopsi Nilai dan Budaya dalam Interaksi Sosial-Politik Tiongkok

Nilai budaya berpengaruh pada perilaku, sikap dan keputusan dari seorang aktor atau pemimpin negara dari sisi pragmatis maupun teoritis. Tiongkok berkembang melalui budaya monarki dari seorang kaisar yang memegang pedoman pada pelestarian sebuah integritas terutama dalam hal perbatasan dan menjaga persatuan internal dalam rangka memperkuat hierarkis dan kekuatan terpusat kekaisaran. Para masyarakat bawah terbiasa untuk saling mendukung dalam unit keluarga besar. Warisan ini melekat pada karakteristik Tiongkok yang menekankan sikap kolektivitas tinggi pada kelompoknya yang penerapannya pada relasi interpersonal, bisnis hingga pemerintahan.

Adopsi budaya yang berkembang salah satunya berasal dari ajaran Konfusianisme sebagai pedoman spiritual dan budaya bangsa Cina. Ajaran filsafat

serupa seperti buddhisme dan taoisme juga menciptakan keberagaman Tiongkok terutama dalam menilai moral dan kolektivisme. Selain bersifat sebagai sebuah keyakinan, nilai ini diterapkan secara pragmatis yang berkembang pada sektor politik, psikologi berupa relasi atasan/superior dan inferior/bawahan, loyalitas, kebijaksanaan, serta kepemimpinan yang kuat. Selain itu, Konfusianisme juga menekankan tatanan masyarakat & negara, hirarki, kepercayaan, control, pengawasan keamanan, kolektivis sebagai mekanisme koordinasi seperti yang diterapkan pada organisasi sosialis dan kapitalis Tiongkok (Muas, 2020: 5).

Kedua paradigma tersebut menempatkan negara sebagai pusat kedaulatan dan kekuasaan. Implementasi keyakinan tersebut menempa keyakinan masyarakat Tiongkok pada setiap bentuk transisi pemerintahan Kekaisaran ke Republik, dan dari Revolusioner ke Reformis tetap membentuk kesinambungan dalam budaya sehingga muncullah ungkapan ‘Konfusianisme-Leninisme’ akan sebuah prinsip yang sudah melekat (Muas, 2020: 7). Penggabungan kedua konsep ini karena karakteristik dasar yang dikembangkan masing-masing ajaran dapat saling melengkapi dan menguatkan prinsip Tiongkok terutama dalam setiap kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Wilhelm (1926) karakteristik konfusianisme dan Taoisme sebagai akar budaya dari karakter Tionghoa. Konfusianisme menempatkan etika secara interpersonal atau ikatan personal (*guan xi*) dari sudut pandang individu atas interaksi sosialnya. Ketika seorang individu Tionghoa memahami konsep wajah atau *miànzi* maka sikap yang dilakukan sejalan dengan keinginan menjaga nama baik identitas pada aktivitas maupun konflik.

2.3.1 Hakikat Miànzi

Menurut perspektif psikologi sosial ‘wajah’ merupakan evaluasi citra seseorang atas tindakannya sendiri dalam situasi sosial atau publik. Wajah menjadi wujud identifikasi utama seseorang sehingga citra dan harga diri dapat menjadi sorotan individu lainnya. Tionghoa mengenal wajah dalam istilah *miànzi* dimana ‘*miàn*’ berarti wajah yang dapat digunakan untuk menilai moralitas dan perilaku seseorang. Dalam buku *Sishū Wǔjīng* atau ‘Empat Buku’ kuno konfusianisme banyak mengaitkan wajah (*miànzi*) dan rasa malu (*chi*) secara berulang kali. Konfusianisme memandang realitas sebagai identitas bangsa yang melekat selama 3000 tahun sehingga wajah dianggap berperan penting terutama bangsa untuk mendapat pengakuan dalam klan sosial seperti di hadapan orang penting, klien atau pejabat pemerintah (Zhou & Zhang, 2017: 3).

Leung dan Chan mendefinisikan *miànzi* sebagai rasa hormat, kebanggaan dan martabat seseorang dari pencapaian sosialnya dalam posisi hirarki atau kelompoknya (Dong & Lee, 2007. p. 1575). Konstruksi *Miànzi* dapat dikategorikan sebagai mekanisme rekognisi sosial atas pengakuan terhadap orang lain. Pendapat ini didukung oleh Ting-Toomey (Oetzel & Ting-Toomey 2003) yang mengemukakan bahwa *Miànzi* cenderung berorientasi pada citra orang lain yang mempengaruhi bagaimana individu merepresentasikan dirinya pada lingkaran sosialnya. Oleh karena itu *Miànzi* terkonstruksi pada tiga komponen yakni kognitif, afektif dan perilaku.

Pencapaian tersebut bersifat situasional sehingga *miànzi* bersifat tidak tetap yang dapat diberikan (*gěimiànzi*), dihilangkan (*dīuliǎn*), atau diperjuangkan (*zhēng*

miànzi). Pandangan ini melekat pada komponen kognitif yang membuat orang Tionghoa berupaya menghindari kehilangan *miànzi* yang berakibat pada hilangnya integritas melalui perasaan bersalah, marah, cemas dan rasa malu.

Pemahaman tentang *miànzi* merupakan hasil dari dinamika kondisi sosial politik di Tiongkok seperti Bangsa Tionghoa memandang dan menghasilkan dua karakter yaitu *zhēng miànzi* berarti mencintai wajah/citranya dan *méi miànzi* berarti gagal mempertahankan wajah/citranya. Sehingga mereka selalu berupaya melindungi *miànzi* dengan menghindari, memperbaiki perilaku seperti pemberian kompensasi atau permintaan maaf maupun melalui pembalasan dengan menyinggung dan mengutuk pihak bersangkutan. Mekanisme ini sebagai karakteristik dasar *face-work* sebuah budaya yang mengharapkan individu untuk melindungi wajah dalam interaksi dengan orang lain. Menurut Hwang (Hwang, 1987) *miànzi* merupakan sejenis negosiasi atau permainan kekuasaan yang secara intens menjalankan norma kolektivitas (*Collectivity*) untuk mendapat legitimasi (*legitimacy*), dan pengakuan (*reputation*).

2.3.2 Relevansi *Miànzi* dan Nasionalisme

Nasionalisme dan budaya wajah adalah dua aspek yang memiliki dampak besar pada kehidupan sosial dan identitas bangsa. Nasionalisme melibatkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara dan budaya sendiri, sementara budaya wajah berkaitan dengan konsep rasa malu dan kehormatan dalam interaksi sosial. Nasionalisme memainkan peran penting dalam membangun dan mengokohkan identitas bangsa. Ketika individu merasakan afiliasi dan kebanggaan terhadap negara, mereka lebih cenderung mempertahankan nilai-nilai budaya dan warisan

sejarah. Nasionalisme dapat menjadi pendorong solidaritas sosial dan semangat kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan Budaya wajah, yang terutama ditemukan dalam masyarakat Asia, mengatur bagaimana individu berinteraksi dalam rangka mempertahankan harga diri dan menghindari konflik terbuka. Konsep ini mempengaruhi cara orang berkomunikasi, mengekspresikan emosi, dan menilai perilaku sosial. Budaya wajah memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan membangun hubungan yang saling menguntungkan (St. André, 2013: 8).

Tiongkok mengenal *Miànze*, *Miànze* adalah konsep budaya Tionghoa yang menekankan pada pemeliharaan kehormatan dan reputasi dalam interaksi sosial. Pentingnya *Miànze* membentuk cara orang berkomunikasi, berperilaku, dan membangun hubungan. Melalui *Miànze* Individu memprioritaskan kesatuan atau *Familism-Miànze* yang diartikan sebagai "*loving the state*". *Loving state* sejalan dengan pemahaman patriotistik yang ditanamkan oleh Partai Komunis Tiongkok (St. André, 2013: 10)

Nasionalisme membantu masyarakat mempertahankan nilai-nilai khas dan berkontribusi pada perkembangan budaya global dengan menghadirkan perspektif unik. Budaya wajah, sementara itu, dapat mengurangi benturan budaya dan mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan. Pendapat ini diperkuat oleh Prof. Zhao Changfeng dalam wawancara yang menyebutkan bahwa

“Yes, there is a correlation between miànzi and nationalism. Miànzi is intertwined with national pride and reputation. In times of conflict, the Chinese government and public may prioritize preserving their nation's miànzi to demonstrate their strength and maintain their dignity in the international arena (Adanya korelasi antara miànzi dan nasionalisme dalam menghadapi konflik. miànzi terkait dengan kebanggaan dan reputasi nasional).”

Pemerintah Tiongkok memprioritaskan untuk menilai *Miànzi* bangsanya sebagai demonstrasi atas kekuatan dan martabatnya di kancah internasional. Prof Zhao menyampaikan bahwa dalam situasi dimana adanya konflik, *Miànzi* berdampak signifikan terhadap cara pemerintah dan Masyarakat Tiongkok memandang dan merespons situasi tersebut. Cara Tiongkok menangani situasi tertentu berelevansi untuk dapat meningkatkan atau bahkan konflik tersebut beresiko merusak reputasinya di panggung global. Oleh karena itu, *Miànzi* dapat mempengaruhi persepsi mengenai kekuatan, ketahanan dan keterampilan dalam berdiplomasi.

Nasionalisme dan *Miànzi* memiliki dampak yang kuat dalam membentuk identitas budaya dan dalam interaksi antarbangsa. Keduanya dapat saling melengkapi dalam menghadapi tantangan global dan dalam membangun dunia yang lebih inklusif dan harmonis. Harmoni antara nilai-nilai nasional dengan pengertian terhadap budaya lain, serta menghargai *Miànzi* dalam komunikasi, adalah langkah-langkah yang penting untuk mencapai keseimbangan yang sehat dalam dinamika budaya dan hubungan antarbangsa. Meskipun nasionalisme dan budaya wajah memiliki nilai positif, juga ada potensi untuk konflik. Terlalu banyak nasionalisme dapat memicu etnosentrisme, sementara budaya wajah yang ekstrim dapat

menghambat komunikasi terbuka. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang bijaksana untuk memastikan bahwa nasionalisme dan budaya wajah tidak melampaui batasnya.

2.4 Negosiasi dan Upaya Diplomatik

Negosiasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara dua atau lebih pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ada beberapa pendekatan yang dapat diambil dalam negosiasi, di antaranya adalah pendekatan kompetitif (win-lose), kolaboratif (win-win), akomodatif, menghindar, dan kompromi. Pendekatan kolaboratif, yang mengejar keseimbangan antara kepentingan semua pihak, dianggap sebagai pendekatan yang paling menguntungkan dalam jangka panjang. Namun, tidak ada pendekatan universal dalam negosiasi internasional antar pihak yang dapat berbeda-beda karena faktor sejarah, budaya dan ekonomi latar belakang. Negosiasi memiliki tahapan sebagai ‘titik balik’ kesuksesan negosiasi (Klecha, 2017).

Pertama, pra-negosiasi merupakan fase eksperimen dimana perundingan guna mengevaluasi situasi sebelum membuat komitmen. Pra negosiasi bertujuan agar kedua pihak menyetujui negosiasi formal atau membatalkan prosedur. Menurut Mahoney (2014) menyebutkan bahwa para negosiator tidak boleh menyembunyikan motif untuk melakukan pelanggaran pada perjanjian. *Kedua*, fase perundingan yang mencakup pertukaran informasi, diskusi mengenai keputusan alternatif secara rinci dan tersistematis. Delapan tahap yang dilalui pada fase perundingan yaitu pencarian agenda, mendefinisikan permasalahan, penetapan

batas maksimal sengketa, penyempitan perbedaan, tawar menawar hingga pelaksanaan perjanjian. Keseluruhan fase harus berkesinambungan agar tidak terganggu. *Ketiga*, fase perjanjian dimana pihak sepakat mencapai tujuan yang harus sepenuhnya disepakati hingga implementasi perjanjian yang akan dilakukan (Klecha, 2017).

Menurut Meerts (2015: 15), menyampaikan bahwa negosiasi perlu memenuhi syarat tak tertulis yang berwujud keinginan untuk mencapai kesepakatan. Namun, pada beberapa kasus keinginan untuk bernegosiasi didorong oleh keinginan masing-masing pihak. Hal ini berdasarkan kondisi yang lebih menguntungkan. Jika salah satu pihak memiliki niat agresif dalam pikirannya maka negosiasi sulit untuk mencapai kesepakatannya. Kepentingan dalam mencerminkan keberhasilan negosiasi, jika posisi dan kebutuhan atas satu pihak benar-benar berlawanan maka sulit untuk mengharapkan proses negosiasi yang sukses.

Pada situasi tersebut, Zartman (2005:26) mendeskripsikannya sebagai situasi '*Mutually Hurting Stalemate*' (MHS) atau 'kebuntuan yang saling menyakiti'. Kondisi ini berupa *status quo* yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat sehingga mendorong mereka untuk memilih negosiasi atas situasi yang ada. Kebuntuan membawa beberapa masalah sulit untuk dinegosiasikan, tetapi negosiasi dapat membawa ke kondisi '*Mutual Benefit Stalemate*' (MBS) yang lebih stabil untuk hidup berdampingan. Meskipun tetap dapat menggunakan kondisi 'kebuntuan; untuk mengendalikan pihak lainnya. Hal ini karena kekuatan dominan biasanya tidak tertarik untuk menyelesaikannya namun memanfaatkan situasi untuk melemahkan lawannya.